

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Skripsi ini mengkaji permasalahan mengenai strategi kebijakan vaksinasi covid-19 (*coronavirus disease 2019*) di DKI Jakarta. Kebijakan vaksinasi covid-19 diharapkan dapat mencegah dan mengurangi penularan virus covid-19, namun pada pelaksanaannya kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta menghadapi masalah, yaitu menurut survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Jakarta adalah kota tertinggi di Indonesia dengan penolakan terhadap kebijakan vaksinasi covid-19 sebesar 33%. Masalah utama dalam survei tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan vaksin covid-19. Oleh karena itu, Pemprov DKI menyusun strategi untuk melaksanakan kebijakan vaksinasi covid-19 agar mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu *herd immunity* (kekebalan kelompok).

Di Indonesia dalam menangani kasus covid-19 yang terus meningkat, Indonesia membutuhkan sebuah kebijakan, adanya kebijakan dari pemerintah untuk menangani kasus covid-19 akan memulihkan keadaan dengan cepat dan terkendali. Beberapa kebijakan, yaitu tertera dalam Peraturan Presiden (PERPRES), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Menteri (PERMEN), dan Peraturan Bupati (PERBUB) (Fitriyana, 2021).

Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani lonjakan kasus covid-19 di tanah air yaitu dengan kebijakan vaksinasi covid-19. Kebijakan vaksinasi covid-19 adalah kebijakan pemerintah yang bersifat top-down yaitu sebuah keputusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh birokat tingkat bawahnya (Agustino, 2006). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bahkan sebelum penyebaran kasus covid-19 sampai ke Indonesia, sejak tanggal 4 Februari 2020 Menteri Kesehatan RI

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang berpotensi menjadi pandemi dan upaya penanggulangannya (Kemkes, 2020).

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 memiliki tujuan untuk: menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19, mengurangi transmisi/penularan dari covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi berjalan dengan baik (Indonesia P. , 2021).

Menurut Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro Sp. PD., menyatakan bahwa vaksin merupakan upaya paling efektif dalam upaya pencegahan infeksi penularan penyakit. Jika seluruh masyarakat melakukan vaksinasi, maka kemampuan virus untuk menyebar menjadi terbatas, sehingga individu yang tidak dapat melakukan vaksinasi juga bisa tetap sehat. Jika banyak masyarakat yang patuh, maka hal ini bisa memutus mata rantai penularan penyakit kepada individu yang tidak melakukan vaksinasi seperti penderita imunokompromais dan bayi atau anak-anak yang belum cukup umur mendapatkan vaksin tertentu (Maarif, 2020).

Vaksinasi covid-19 telah menjadi sebuah kewajiban sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 13A ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai target penerima vaksinasi covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi covid-19 (Almanzani, 2022).

Dalam implementasi kebijakan vaksinasi covid-19, Indonesia menghadapi masalah yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas sebanyak 31 persen masyarakat Indonesia tidak mau di vaksinasi covid-19 (Luthfan, 2021). Penolakan

vaksin covid-19 di Indonesia di latar belakang oleh berita hoax dan keyakinan dari sisi agama terkait halal atau haramnya vaksin covid-19 (Intan, 2021).

Untuk membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia menjadi orang pertama yang melakukan vaksinasi covid-19. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Indonesia agar bersedia melakukan vaksinasi covid-19 dan membuktikan bahwa tidak ada efek samping yang serius dalam vaksin covid-19 (Faiq, 2021). Selain itu pemerintah Indonesia melakukan beberapa strategi untuk mendorong proses vaksinasi covid-19, antara lain berupa persuasif yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki pengaruh besar (Intan, 2021). Pemerintah Indonesia juga melibatkan artis dan influencer untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap vaksin covid-19 (Hakim R. N., 2021).

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kebijakan vaksinasi covid-19 sejak awal dibentuk oleh pemerintah pusat memang selalu melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar penanganan covid-19 tidak menciptakan situasi yang kontraproduktif (Kompas.com, 2021).

Di Indonesia, Jakarta merupakan kota dengan tingkat covid-19 paling tinggi. Hingga tanggal 12 Januari 2021 kasus covid-19 di Jakarta tertinggi dibanding dengan kota lain di Indonesia, mencapai 18.988 kasus aktif dan dengan tambahan kasus harian tertinggi diantara kota lain di Indonesia (Detik.com, 2021). Dengan meningkatnya kasus yang terjadi di DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan vaksinasi covid-19 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 sebagai bentuk dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Jakarta (Indonesia R. , 2021).

Lalu terkait dengan vaksin covid-19, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat yang memberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya untuk seluruh masyarakat Indonesia (Firdaus, 2021) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menargetkan pelaksanaan vaksinasi tercapai sebanyak 3 (tiga) juta pada

akhir juni 2021 (CNN, 2021) Lalu Anies Baswedan juga memiliki target untuk DKI Jakarta dalam melakukan kegiatan vaksinasi covid-19 100.000 (seratus ribu) orang setiap harinya dalam rangka untuk mengejar target dari Presiden tanah air, Jokowi (CNN, 2021).

Dalam proses mengejar target pencapaian *herd immunity* melalui vaksinasi covid-19, kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta justru mengalami sebuah kendala yaitu sebanyak 3,4 juta warga DKI Jakarta belum melakukan vaksinasi covid-19. Kelompok anti vaksin di Jakarta dipengaruhi oleh berita hoaks mengenai vaksin covid-19 yang berbahaya, tidak efektif, dan memiliki efek samping. Penolakan mengenai vaksin covid-19 juga dipengaruhi oleh faktor agama, kelompok anti vaksin di Jakarta tidak percaya dan meragukan bahwa vaksin covid-19 halal (Paat Y. , 2021).

Berdasarkan survei tingginya penolakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta, hal ini dinilai mencemaskan mengingat DKI Jakarta merupakan kota dengan kasus aktif covid-19 tertinggi di Indonesia, rendahnya kepercayaan masyarakat DKI Jakarta menjadi faktor utama terjadinya hambatan dalam implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 karena dapat memperlambat pencapaian *herd immunity* di DKI Jakarta (Hakim S. , 2021).

Dalam usaha mencapai target *herd immunity*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memakai pendekatan represif dan persuasif dalam strateginya untuk mencapai target vaksinasi covid-19. Dalam pendekatan represif pemerintah DKI Jakarta memberlakukan denda sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi covid-19 (Prireza, 2021).

Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga memberlakukan pembatasan kegiatan di ruang publik bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin covid-19. Pembatasan tersebut dilakukan di ruang publik seperti mall, pasar, dan tidak bisa menghadiri acara apapun di Jakarta, hal ini dilakukan untuk mendorong pergerakan masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan vaksinasi covid-19 agar mematuhi kebijakan vaksinasi covid-19 yang sudah dibentuk di DKI Jakarta. Dengan melaksanakan vaksinasi covid-19 sesuai dengan aturan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, masyarakat DKI Jakarta dapat kembali melakukan kegiatan secara produktif dan nyaman (Firmansyah, 2021).

Dalam pendekatan persuasif, pemerintah provinsi DKI Jakarta memanfaatkan tokoh masyarakat untuk membangun kepercayaan warga DKI Jakarta terhadap vaksin covid-19 (Prayoga, 2021) Lalu Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta juga memanfaatkan peran RT dan RW untuk mempercepat proses vaksinasi covid-19. Melalui RT dan RW warga DKI Jakarta bisa mendapatkan lokasi terdekat untuk melakukan vaksinasi covid-19, RT dan RW di Jakarta juga ditugaskan untuk mensosialisasikan warganya agar segera melakukan vaksinasi covid-19 dalam rangka mematuhi kebijakan yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Basri, 2021).

Saat ini disetiap daerah di Indonesia melalui Pemerintah Daerahnya berusaha memenuhi target vaksinasi covid-19 untuk menciptakan *herd immunity* di tanah air (Kusuma, 2021). Begitupun dengan DKI Jakarta, dalam mendukung percepatan target vaksinasi covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuat alokasi kuota vaksinasi covid-19 di Jakarta melalui aplikasi JAKI, aplikasi JAKI merupakan sebuah dukungan dari pemerintah daerah dalam menanggapi pemenuhan *herd immunity* dari pemerintah pusat (Simorangkir, 2021). Pemerintah DKI Jakarta juga memfasilitasi vaksin yang dilakukan dengan metode keliling untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam menjangkau lokasi vaksinasi covid-19 dan Pemerintah DKI Jakarta dalam proses vaksinasi covid-19 melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, usaha tersebut mendukung percepatan vaksinasi covid-19 berjalan secara efektif dan cepat (Bangkit, 2021).

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 sebagai bentuk dalam penanggulangan pandemi covid-19 di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 966 Tahun 2021 tentang peraturan PPKM Level 4 yang mengatur aktivitas dan kegiatan di DKI Jakarta dan Anies Baswedan mewajibkan seluruh warga DKI Jakarta sudah melakukan vaksinasi covid-19 (Amalia, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi covid-19 di Jakarta pada tahun 2021. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang tentunya berkesinambungan dengan penelitian penulis.

Di China, Wang, Ji Q, Dong S, Zhao, Li X, Zhu, Long S, Zhang, Jin H (2021) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat China terhadap keraguan vaksin covid-19. Faktor yang paling berpengaruh adalah mengenai keamanan vaksin covid-19 yang memunculkan kekhawatiran tentang efek samping dari vaksin, dan efektifitas dari vaksin covid-19. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menghilangkan keraguan yang sudah ada mengenai vaksin covid-19, yaitu pemerintah memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin dengan memberikan informasi kepada publik secara transparan. Rekomendasi jurnal tersebut adalah cakupan vaksinasi yang tinggi merupakan kunci dalam mengontrol pandemi covid-19. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus membangun cakupan vaksinasi covid-19 untuk mencegah peningkatan covid-19.

Di Amerika Serikat, Khubchandani, Sharma S, Price H, Wiblishauser M, Sharma M, J Webb (2021) penelitian ini menunjukkan 22% penolakan terhadap vaksin covid-19. Penolakan dilakukan atas dasar keraguan terhadap efektifitas dan mengenai keamanan vaksin covid-19. Penelitian ini mengungkapkan beberapa cara untuk menghilangkan keraguan terhadap vaksin covid-19, yaitu harus tersedianya informasi yang transparan mengenai kemanjuran vaksin, keamanan, efek samping, dan rincian hasil uji coba yang mengklaim keberhasilan vaksin covid-19. Komunikasi yang efektif tentang keamanan dan kemanjuran vaksin secara transparansi akan menjadi landasan semua strategi terkait vaksin covid-19.

Bernardeau-Serra, Nguyen-Huynh, Sponagel, Nuimaraes, Aguiar, Marcolino (2021) penelitian di Brazil menemukan bahwa brazil memiliki dua gelombang dalam penanganan covid-19 namun brazil memiliki faktor keberhasilan dan hambatan dalam strategi vaksinasi covid-19. Faktor hambatan terjadi pada tahap awal pengadaan vaksinasi covid-19, dan Brazil memiliki angka covid yang

tinggi. Namun hasil penelitian ini dapat menunjukkan keberhasilan dari pengadaan vaksinasi covid-19, kunci keberhasilan vaksinasi covid-19 di Brazil adalah mekanisme kelembagaan kesehatan yang kuat, menunjukkan bahwa sistem kesehatan di Brazil berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan di India oleh Chandania, Thorat, Suryawanshi, Chitlange, Sahu, Jani, Sharma, Khubchandani (2021) menemukan hasil penelitian di India mengenai vaksin covid-19, hasilnya 37 persen memiliki keraguan terhadap vaksin covid-19. Keraguan dipengaruhi mengenai efek samping, keamanan, efektivitas, dan perkembangan vaksin yang sangat cepat menumbuhkan keraguan atas vaksin covid-19. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan edukasi yang disesuaikan dengan budaya yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan yang profesional mengenai vaksin covid-19 dengan bukti akurat tentang keamanan vaksin covid-19.

Sedangkan di Afrika, Cooper, Van Rooyen, Wiysonge (2021) menemukan bahwa hambatan yang mempengaruhi keraguan warga Afrika terhadap vaksinasi covid-19, yaitu uji klinis dari vaksin covid-19 yang hanya dilakukan secara singkat. Faktor lain turut mempengaruhi yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dari vaksin covid-19. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mengkaji beberapa hambatan dari kebijakan vaksinasi covid-19. Hasil penelitian ini dapat memberikan perspektif terhadap pemerintah yang harus bisa memberikan kepercayaan yang terjamin dan transparan mengenai kegiatan vaksinasi covid-19, pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan upaya memainkan peran dengan memotivasi dan meyakinkan warganya untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadap vaksin covid-19.

Penelitian oleh Iklisik, Sezerol, Isil Maral (2021) di Turkey menemukan bahwa adanya faktor penghambat yaitu penolakan terhadap vaksinasi covid-19 sebanyak 18,2% dan keraguan terhadap vaksin covid-19 (studi kasus distrik Istanbul). Hasil penelitian Hatice Iklisik dkk memberikan rekomendasi bahwa semua kepentingan harus menunjukkan kebijakan ilmiah yang transparan dan berbasis bukti dan menunjukkan komunikasi yang jelas kepada masyarakat Istanbul, memberikan pengelolaan yang transparan, tahap pengembangan dan efektivitas

vaksin covid-19. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan yang mengenai tidak kepercayaan sebagian masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 dan fokus terhadap bagaimana upaya pemerintah meyakinkan masyarakat terhadap vaksin covid-19.

Di Surabaya, Akbar, Virdani, Kasih, Arif (2021) menunjukkan faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan vaksinasi covid-19 oleh pemerintah Surabaya. Penelitian ini menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah sebagian masyarakat di Surabaya masih memiliki keraguan terhadap vaksin covid-19. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini berangkat dari sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi yang mendukung. Secara menyeluruh penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 yang dibangun pemerintah kota Surabaya, hasilnya dalam penelitian ini masih menemukan kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai vaksinasi covid-19. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah fokus pembahasan mengenai kebijakan vaksinasi covid-19 yang sudah di bangun oleh pemerintah.

Selanjutnya Woisiri V, Hutapea L (2021) menunjukkan hasil penelitian terhadap vaksin covid-19 di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 persen menolak melakukan vaksinasi covid-19, 27 persen masih ragu terhadap vaksin covid-19. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya edukasi yang membangun kepercayaan terhadap vaksin covid-19 dari pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Jayapura. Masalah utama adalah ketakutan akan efek samping, ketidakpercayaan pada vaksinasi, dan kurangnya informasi tentang vaksin covid-19. Rekomendasi jurnal tersebut adalah sangat penting untuk memastikan transparansi dalam informasi yang diberikan tentang vaksin covid-19. Landasan penerimaan vaksinasi adalah kepercayaan masyarakat, yaitu kepercayaan terhadap vaksin, dan pemerintah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan yang berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Sedangkan Putri, Wiranti, Ziliwu, Elvita, Frare, Purdani, Niman (2021) menunjukkan 48,1 persen memiliki keraguan dan kecemasan terhadap vaksin covid-



19. Keraguan dan kecemasan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh berita palsu atau hoax terhadap vaksin covid-19 yang menghasilkan respon negatif terhadap vaksin covid-19 dan keraguan dipengaruhi oleh efek samping yang akan muncul dari vaksin covid-19. Secara menyeluruh jurnal tersebut menjelaskan mengenai berbagai macam jenis vaksin, kecemasan terkait vaksinasi covid-19, keraguan terhadap vaksin covid-19, dan bagaimana pemerintah harus memprioritaskan pemberantasan hoax mengenai vaksin covid-19 agar pemenuhan vaksinasi covid-19 berjalan dengan baik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan mengenai pemberian vaksin covid-19 kepada masyarakat.

Terakhir penelitian Saraswati, Sunarta (2021) menunjukkan faktor keberhasilan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar terhadap vaksinasi covid-19. Penelitian ini menunjukkan adanya program jempot bola dalam kebijakan vaksinasi covid-19 di kota Denpasar, menunjukkan hasil relevansi jika sebuah kebijakan dilakukan secara benar, tepat dan dilakukan oleh implementor yang terkait maka sebuah kebijakan yang sudah dibentuk dan berjalan akan menghasilkan hasil yang efektif bagi masyarakat sasaran. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitiannya akan membahas terkait bagaimana kebijakan yang dilakukan dan strategi apa yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tersebut dibangun, hal tersebut sama dengan apa yang akan peneliti kaji.

Dalam sepuluh penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian pertama hingga penelitian keenam membahas mengenai keraguan atas vaksin covid-19 di berbagai negara. Dalam Penelitian internasional peneliti dapat menyimpulkan bahwa keraguan atas vaksin covid-19 tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hal ini terjadi di berbagai negara. Sedangkan dalam keempat penelitian lainnya lebih menekankan pembahasan keraguan atas vaksin covid-19 secara nasional yang sangat mempengaruhi kebijakan vaksinasi covid-19. Di dalam penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan saya kaji dalam skripsi ini. Persamaan nya adalah kesepuluh penelitian tersebut mencari faktor yang mengganggu proses vaksinasi covid-19 dan menjelaskan upaya dari pembuat kebijakan dalam mengatasi terhambat nya vaksinasi covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut adalah tidak semuanya mencantumkan

dan menjelaskan strategi apa saja yang dibangun oleh pembuat kebijakan secara jelas.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan menjadi pokok permasalahan penulis adalah:

Bagaimana strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang dibangun dan digunakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai keberhasilan dan mencapai target *herd immunity* dari kebijakan vaksinasi covid-19 tahun 2021 di DKI Jakarta yang memiliki kendala dalam pelaksanaannya.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat - manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Bagi Penulis
    1. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, penulis dapat menambah serta memperdalam wawasan dan pengetahuannya mengenai implementasi kebijakan dan strategi politik.
    2. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kinerja dari Pemerintah DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
    3. Hasil penelitian memiliki tujuan bagi penulis untuk memenuhi syarat kelulusan gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran "Jakarta".
  - b) Bagi Pembaca

1. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai implementasi kebijakan, strategi politik dalam kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta pada tahun 2021.
2. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pembandingan untuk penelitian dimasa sekarang hingga masa depan.
3. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan topik yang sama.

## 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana kebijakan vaksinasi covid-19 berjalan dengan baik dalam mengatasi masalah yang ada dalam proses kegiatan vaksin massal covid-19.

## I.5 Sistematika Penulisan

Demi memberikan pemahaman yang teratur dan jelas dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

### **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang juga terdapat tinjauan pustaka, rumusan permasalahan juga meliputi tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematis penulisan.

### **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai konsep penelitian yaitu konsep kebijakan publik, teori penelitian yang digunakan yaitu implementasi kebijakan dan strategi politik serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data serta tabel rencana waktu penelitian.

### **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai fakta dan fenomena yang sudah di temukan di lapangan sehingga akan sesuai dengan latar belakang yang telah dibuat. Fakta dan fenomenanya akan berisi mengenai gambaran umum Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta, faktor-faktor penyebab rendahnya kepercayaan warga DKI Jakarta terhadap vaksinasi covid-19, serta menjelaskan strategi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian.

### **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab penutupan ini berisikan kesimpulan dan juga saran terkait dengan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian dalam skripsi.